

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Agraria*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.
- Dalimunthe, Chadidjah. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahanny*. Medan: FH USU Press, 2000.
- Daliyo, J.B. dkk. *Hukum Agraria I*. Jakarta: PT. Prehallindo, 2001
- Goenawan, Kian. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Properti*. Yogyakarta: Best Publisher, 2009.
- Gunanegara. *Hukum Pidana Agraria : Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2017.
- _____. *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*. Jakarta: Tatanusa, 2018.
- Hadiwiyono, Suharyono M. *Hukum Pertanahan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Malang: Inteligensia Media, 2020.
- Hadjon, Philipus M. R.Sri Soemantri Martosoewignjo dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjja Mada University Press, 2015.
- Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1998.
- Hajati, Sri dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.
- Hutagalung, Arie. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Lubis, Muh. Yamin dan Abdul Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Parlindungan, A.P. *Hilangnya Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- _____. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Prints, Darwan. *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.
- _____. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.
- _____. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2019.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Siregar, Tampil Anshari. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Medan: Multi Grafik, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: Rajawali Pers, 2001.
- Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta.: Raih Asa Sukses, 2012.
- Waskito dan Hadi Amowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Zarqoni, Mohammad Machfudh. *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

JURNAL

Apriani, Desi dan Arifin Bur. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5 No. 2, Maret 2021.

Gunanegara, “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah”, *Law Review* Vol XXI No. 3, Maret 2022.

Hadisiswati, Indri. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *Ahkam* Vol 2 No. 1, Juli 2014.

Irawaran, Dedy Setyo dan Harvini Wulansari. “Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas *Contradictoire Delimitatie* Di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuran”, *Jurnal Tunas Agraria* Vol 3 No. 2, Mei 2020.

Khairina, “Sertifikat Cacat Hukum Dalam Pertanahan di Indonesia”, *Juris* Vol. 13 No. 1, Juni 2014.

Mujiburohman, Dian Aries. “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, *Bhumi* Vol. 4 No. 1, Mei 2018.

Silviana, Ana. “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol 4 No. 1, Maret 2021.

HASIL PENELITIAN

Sari, Desideria Anindita. “Pelaksanaan Penetapan Biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik Melalui Program Nasional (PRONA) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten”. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

WEBSITE

“Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh dan Cara Memperolehnya”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, diakses pada 13 April 2022.

Penting, Dua Alasan Mengapa Tanah Perlu Disertifikatkan,
<https://properti.kompas.com/read/2020/08/10/155407421/penting-dua-alasan-mengapa-tanah-perlu-disertifikatkan>, diakses 13 Desember 2021.

Tanah Bersertifikat Di RI Baru Capai 72 Juta Bidang,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204171319-92-602391/tanah-bersertifikat-di-ri-baru-capai-72-juta-bidang>, diakses 30 November 2021.

8 Pegawai BPN Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah Di Cakung, Apa Kata Jubir Menteri?,
<https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/24/180000821/8-pegawai-bpn-jadi-tersangka-kasus-mafia-tanah-di-cakung-apa-kata-jubir?page=all>, diakses 05 Maret 2022.

Langkah Hukum Jika Sertipikat Tanah Tumpang Tindih,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-sertipikat-tanah-tumpang-tindih-lt5f48af9a5cd49>, diakses pada 26 Mei 2022.

